

— Susi Fitria Dewi, Ph.D —

Sosiologi Politik



SOSIOLOGI POLITIK

Susi Fitria Dewi, S.Sos., M.Si., Ph.D



GRE PUBLISHING
Road Abroad

Sosiologi Politik

Penulis : Susi Fitria Dewi, S.Sos., M.Si., Ph.D
Design Cover dan Tata Letak : Marwan & Gun

Penerbit
GRE PUBLISHING
Jln. Magelang Km. 3
Gang Margo Agung Karangwaru Lor TR II/417C
Yogyakarta - 55241
<http://grepublishing.com>

Cetakan 2017
ISBN 978-602-7677-32-6

Dilarang keras mereproduksi sebagian atau seluruh isi buku ini, dalam bentuk apapun atau dengan cara apapun, serta memperjual-belikannya tanpa izin tertulis dari penerbit

© HAK CIPTA DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG

KATA PENGANTAR

Sosiologi politik merupakan kajian interdisiplin, irisan dua bidang ilmu, yakni sosiologi dan politik. Apabila sosiologi mengkaji mengenai masyarakat, lalu politik mengkaji kekuasaan para pengambil keputusan, maka sosiologi politik mengkaji relasi antara kehidupan masyarakat dengan keputusan-keputusan yang diambil oleh penguasa. Konsep-konsep sosiologi politik bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan zaman sehingga menarik perhatian siapa saja yang mengikuti dinamika politik. Manfaat terbesar dari bidang sosiologi politik adalah mencerdaskan pembaca dalam menganalisis situasi sosial politik yang ada di sekitarnya.

Buku ini terdiri dari tujuh bab, dimana pembahasan dimulai dari konsep dasar sosiologi politik, konsep kekuasaan, faktor-faktor dalam struktur politik, unsur-unsur politik, gerakan sosial dan partai politik, konflik dan penyelesaiannya, terakhir hubungan parpol dengan perubahan politik. Pemilihan tema disesuaikan dengan konsep-konsep yang sering didiskusikan dalam ruang perkuliahan dan *issue* yang menjadi perbincangan di berbagai media massa. Sehingga buku *Sosiologi Politik* ini dapat digunakan oleh mahasiswa dan para pembaca yang tertarik dengan fenomena sosiologi politik.

Konsep yang terdapat dalam buku ini berasal dari konsep-konsep yang telah dituliskan oleh penulis buku sosiologi politik sebelumnya, seperti Tom Bottomore, Rafael Raga Maran, Maurice Duverger, Damsar, Michael Rush & Philip Althoff, Keith Faulks dan Mochtar Mas' oed Nasikun. Kelebihan buku ini adalah dituliskan dalam bahasa yang lebih sederhana, dilengkapi dengan bagan alur serta beberapa analisis fenomena

sosiologi politik terkini, sehingga diharapkan mudah dimengerti oleh para pembaca.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada pembaca, penerbit, pimpinan Universitas Negeri Padang, Dikti, mahasiswa dan rekan-rekan seperjuangan dari jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, teristimewa kepada keluarga, yang telah memberikan motivasi dan kesempatan untuk terus berkarya. Semoga langkah kecil ini membawa manfaat bagi siapa saja, hari ini dan untuk masa yang akan datang.

Padang, Agustus 2017

Susi Fitria Dewi

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ~ iii
Daftar Isi ~ v

BAB I KONSEP DASAR SOSIOLOGI POLITIK ~ 1

Definisi dan Konsep Sosiologi ~ 1
Definisi dan Konsep Politik ~ 5
Definisi Sosiologi Politik ~ 7
Perdebatan tentang Fokus Kajian Sosiologi Politik ~ 10
Titik Pandang Sosiologi Politik ~ 19
Teori Sosiologi Politik ~ 21
Manfaat Sosiologi Politik ~ 23

BAB 2 KONSEP DAN TEORI KEKUASAAN ~ 25

Definisi Kekuasaan ~ 26
Sumber Sumber Kekuasaan ~ 27
Bagaimana seseorang dapat memiliki kekuasaan dalam bidang politik dengan menjadi seorang legislator? ~ 28
Pendapat Para Ahli terkait Pemikiran Sosiologi tentang Kekuasaan ~ 31
Perbedaan Kekuasaan pada Masyarakat Sederhana dan Maju ~ 35
Pertumbuhan Kekuasaan ~ 37
Struktur Kekuasaan dan Aksi ~ 38

Unsur-Unsur Terbentuknya Kekuasaan Tertinggi dalam
Negara ~ 41
Legitimasi dan Koersi ~ 41

BAB 3
FAKTOR-FAKTOR DALAM STRUKTUR POLITIK ~ 43

Struktur Fisik ~ 44
Struktur Sosial ~ 47

BAB 4
UNSUR-UNSUR POLITIK ~ 57

Definisi Sosialisasi Politik ~ 57
Agen Sosialisasi Politik ~ 58
Lima Mekanisme Sosialisasi Politik ~ 64
Perkembangan Sosialisasi Politik ~ 68
Kepribadian Politik ~ 69
Sikap Politik ~ 71
Partisipasi Politik ~ 72
Tipologi Partisipasi Politik ~ 73
Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik ~ 78
Alasan Seseorang Mau atau Tidak Mau Berpartisipasi
dalam Kegiatan Politik ~ 80
Komunikasi Politik ~ 83
Model Komunikasi Politik ~ 84
Komunikator Politik ~ 85
Definisi Marketing Politik ~ 87
Empat Elemen Marketing Politik ~ 88
Lima Fungsi Komunikasi Politik ~ 90
Tujuan Umum tentang Komunikasi ~ 92
Pembentukan Pendapat Umum ~ 94

BAB 5
GERAKAN SOSIAL DAN PARTAI POLITIK ~ 99

- Definisi Gerakan Sosial ~ 100
- Tipe-Tipe Gerakan Sosial ~ 104
- Sebab-Sebab Terjadinya Gerakan Sosial ~ 105
- Definisi Partai Politik ~ 106
- Perkembangan Partai Politik ~ 107
- Fungsi Partai Politik ~ 108
- Tipologi Partai Politik ~ 112
- Hubungan Gerakan Sosial dan Partai Politik ~ 114
- Perbedaan Gerakan Sosial dan Partai Politik ~ 115

BAB 6
KONFLIK DAN PENYELESAIANNYA ~ 117

- Pengertian Konflik ~ 118
- Faktor Konflik ~ 119
- Definisi Konflik Menurut Beberapa Ahli ~ 122
- Tingkatan Subjek Konflik ~ 124
- Tahap Konflik ~ 126
- Wujud Konflik ~ 128
- Lima Gaya Konflik ~ 129
- Dua Jenis Konflik ~ 135

BAB 7
HUBUNGAN PARTAI POLITIK DENGAN PERUBAHAN
POLITIK ~ 145

- Partisipasi dalam Perubahan Politik yang Rutin ~ 146
- Partisipasi dalam Perubahan yang Disruptif
(Kacau) ~ 148
- Sebab-Sebab Perubahan Politik ~ 152
- Beberapa Tipe Perubahan Politik ~ 155
- Sebab Terjadinya Perubahan Sosial ~ 159
- Strategi Perubahan Sosial ~ 160

Tiga Problem Sosial yang Sering Dimasukkan sebagai
Sumber Perubahan Sosial ~ 160
Tiga Hal yang Berkenaan dengan Proses Perubahan
Sosial ~ 163
Perbedaan Reformasi dan Revolusi ~ 164

DAFTAR PUSTAKA ~ 165
Indeks ~ 167
Profil Penulis ~ 173

BAB I

KONSEP DASAR SOSIOLOGI POLITIK

Sosiologi politik merupakan kajian interdisiplin, irisan dua bidang ilmu, yakni sosiologi dan politik. Apabila sosiologi mengkaji mengenai masyarakat, lalu politik mengkaji kekuasaan para pengambil keputusan, maka sosiologi politik mengkaji relasi antara kehidupan masyarakat dengan keputusan-keputusan yang diambil oleh penguasa. Konsep-konsep sosiologi politik bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan zaman sehingga menarik perhatian siapa saja yang mengikuti dinamika politik. Manfaat terbesar dari bidang sosiologi politik adalah mencerdaskan pembaca dalam menganalisis situasi sosial politik yang ada di sekitarnya.

DEFINISI DAN KONSEP SOSIOLOGI

Apakah anda pernah membaca istilah sosiologi? istilah sosiologi tidak asing sebab pakar sosiologi sering dimintakan pendapatnya di televisi untuk menganalisis berbagai persoalan kemasyarakatan. Sosiologi adalah ilmu tentang masyarakat.

Secara etimologis kata sosiologi berasal dari bahasa latin: *socius* dan *logos*. *Socius* artinya masyarakat dan *logos* artinya ilmu. Jadi sosiologi adalah ilmu tentang masyarakat

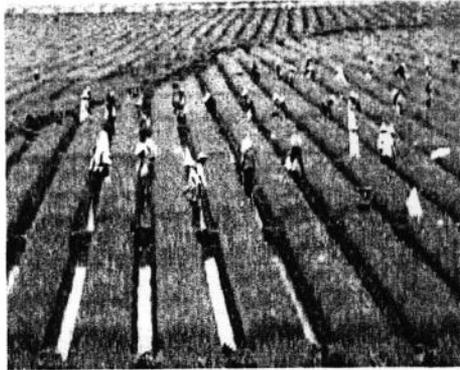
Apa arti masyarakat dan apakah yang bisa dipelajari dalam suatu masyarakat, ? Horton dan Hunt (1987,59) dan Peter L. Berger (1966) dalam Damsar (2010) telah memberi definisi mengenai masyarakat.

Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang secara relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, mendiami suatu wilayah, memiliki kebudayaan yang sama dan melakukan sebagian kegiatannya dalam kelompok tersebut.

Masyarakat yang terdiri dari sekumpulan manusia tersebut selalu berinteraksi satu sama lain. Lalu apa artinya interaksi sosial?

Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih.

Sebagai makhluk sosial, tidak ada satu hari pun tanpa interaksi. interaksi yang dilakukan individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok, dimana kedua belah pihak mengalami kontak dan komunikasi. Wujud komunikasi dapat berupa kata-kata, gerak tubuh ataupun simbol lainnya yang memberi makna. Inilah fokus kajian sosiologi, interaksi sosial dalam masyarakat. Ada banyak kelompok sosial yang terbentuk dalam masyarakat, baik atas kepentingan sosial, ekonomi, politik dan budaya serta agama. Gambar dibawah ini hanyalah beberapa contoh kelompok masyarakat berdasarkan kepentingan ekonomi, sosial dan politik.



beritadaerah.co.id



www.radarbangka.co.id



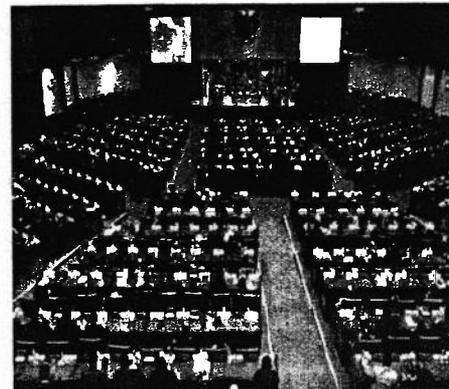
solopos.com



sumutpos.co



korankabar.com



<http://infogreget.blogspot.com>

Berikut ini adalah pendapat beberapa ahli mengenai definisi sosiologi.

David B. Brinkerhoft dan Lynn K. White

Sosiologi merupakan studi sistematis tentang interaksi sosial manusia. Penekanannya pada hubungan hubungan dan pola-pola interaksi, yaitu bagaimana pola-pola tersebut tumbuh kembang, bagaimana mereka dipertahankan dan juga bagaimana mereka berubah.

Pitirim Sorokin

Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial, misalnya gejala ekonomi dengan agama, moral dengan hukum, hukum dengan ekonomi, ekonomi dengan politik dan lain sebagainya. Sosiologi juga mempelajari hubungan timbal balik antara gejala sosial dengan gejala non sosial, misalnya ekonomi dengan geografis. Sosiologi juga mempelajari ciri-ciri umum semua jenis gejala-gejala sosial.

Roucek dan Warren

Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok

William F. Ogburn dan Meyer F. Nimkoff

Sosiologi adalah penelitian secara ilmiah terhadap interaksi sosial dan hasilnya yaitu organisasi sosial

J.A.A van Doorn dan C.J Lammers

Sosiologi adalah ilmu pengetahuan tentang struktur dan proses-proses-kemasyarakatan yang bersifat stabil

Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi

Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses sosial, termasuk perubahan sosial. Struktur sosial adalah jalinan antara unsur sosial yang pokok (norma sosial, lembaga sosial, kelompok serta lapisan sosial). Proses sosial adalah pengaruh timbal balik antara gejala sosial yang melahirkan perubahan sosial dalam struktur sosial.

Soekanto (1990)

DEFINISI DAN KONSEP POLITIK

Apabila sosiologi membahas mengenai masyarakat secara umum dan luas, maka politik fokus membahas pada kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan pengambilan keputusan oleh lembaga pemerintah maupun sosial yang berpengaruh terhadap pemerintah. Sehingga dapat dikatakan bahwa politik adalah cabang khusus dari sosiologi yang telah berdiri sendiri dengan variabel-variabel tertentu.

Bagi mereka yang gemar menyaksikan berita televisi, maka kosakata politik tidak asing lagi. Dalam bidang politik, Indonesia dianggap sebagai negara muslim yang mampu menerapkan sistem berdemokrasi terbaik di dunia. Apa itu politik? Mengapa orang suka membincangkannya? Berikut definisi beberapa ahli.

James A. Caporaso dan Davis P. Levine

Politik sebagai pemerintahan, publik, dan alokasi nilai oleh pihak yang berwenang.

Hans J Morgenthau

Politik adalah pertarungan mendapatkan kekuasaan.

David Easton

Politik adalah pola-pola kekuasaan, aturan dan kewenangan.

Roger F. Soltau

Politik adalah ilmu mempelajari negara, tujuan negara, lembaga-lembaga negara, hubungan negara dengan warga negara, serta dengan negara-negara lainnya.

J. Barents

Politik adalah ilmu yang mempelajari kehidupan negara dan tugas-tugasnya yang merupakan bagian dari masyarakat.

Harold D. Lasswell dan A. Kaplan

Politik adalah "siapa yang mendapatkan apa, kapan dan bagaimana".

Deliar Noer

Politik adalah ilmu yang memusatkan perhatiannya pada kekuasaan dalam kehidupan masyarakat.

Ossip K. Flechtheim

Politik adalah ilmu sosial yang khusus mempelajari sifat dan tujuan negara, sifat dan tujuan kekuasaan, yang dapat mempengaruhi negara. Kekuasaan politik dan tujuan politik mempengaruhi satu sama lain.

Wa Robson

Politik adalah ilmu tentang kekuasaan dalam masyarakat yaitu sifat hakiki, dasar, proses, ruang lingkup dan hasil-hasil.

E.F. Shattschneider

Politik adalah seni dan ilmu dari pemerintahan.

Carl Schmitt

Politik adalah konflik dua pihak.

Maurice Duverger

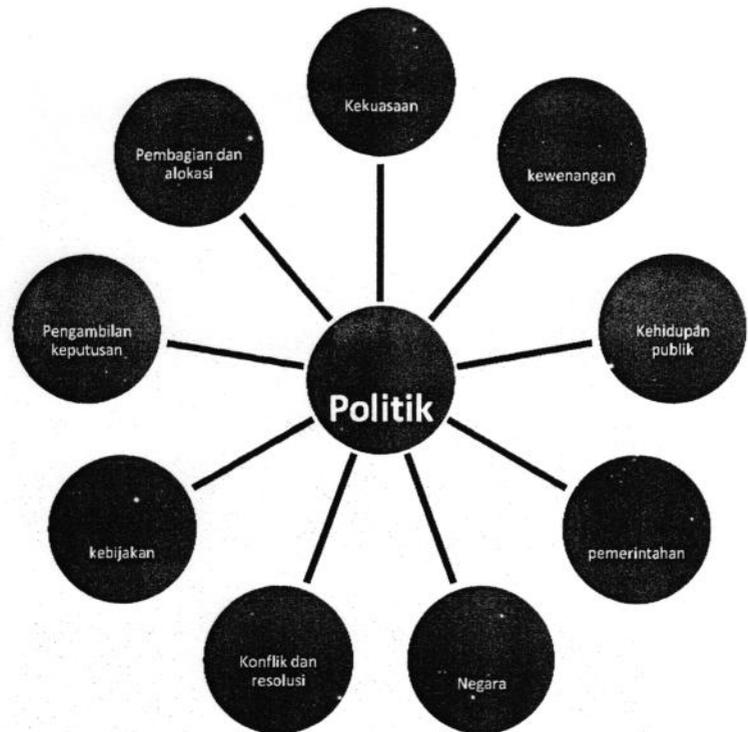
Politik bersifat ambivalen. Politik adalah konflik untuk meraih kekuasaan, satu pihak berusaha merebutnya dari kelompok atau orang yang sedang berkuasa. Pihak yang lain berusaha mempertahankan dominasi terhadap masyarakat dengan cara menentang pihak kompetitornya. Politik juga diartikan usaha menegakkan ketertiban dan keadilan.

Bernard Crick

Politik sebagai penyelarasan, kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan lewat kebijakan publik

Damsar (2010) Budiarto (1972)

Berdasarkan definisi di atas, maka konsep-konsep pokok dalam ilmu politik diperlihatkan pada skema di bawah ini:



DEFINISI SOSIOLOGI POLITIK

Sarjana ilmu politik mengakui pentingnya sosiologi bagi studi tentang politik. Ilmu sosiologi memberikan wawasan berharga mengenai lingkungan masyarakat dimana sistem politik dijalankan. Dalam proses demikian banyak muncul dan berkembang karya-karya yang dapat dikelompokkan sebagai bidang sosiologi politik seperti studi perbandingan sistem politik untuk mengembangkan masyarakat-masyarakat secara khusus. Karya sosiologi politik lainnya adalah penelitian mengenai hubungan antara masalah-masalah politik dan masyarakat, antara struktur sosial dan struktur politik, tingkah laku sosial dengan tingkah laku politik (Rush dan Althoff, 2005).

Beragamnya berbagai definisi sosiologi politik menunjukkan beragamnya objek kajian yang ditulis para ilmuwan, dalam menyoroti kaitan kekuasaan dan masyarakat. Berikut definisi menurut beberapa ahli:

Prof. Dr. Damsar

Sosiologi politik adalah ilmu yang mempelajari masyarakat, dimana di dalamnya terdapat proses dan pola interaksi sosial, dalam hubungannya dengan politik. Masyarakat menuntun individu untuk melakukan kegiatan politik, berdasarkan norma, etika adat dan hukum yang berkembang dalam masyarakat. Para politikus berinteraksi untuk mengambil kebijakan, melaksanakan kewenangan dan kekuasaan, serta melakukan pembagian dan alokasi sumber daya.

A.A. Said Gatara dan Moh. Dzulkiah Said

Sosiologi politik adalah disiplin ilmu yang mempelajari hubungan antara masyarakat dan politik, hubungan antara masyarakat dengan lembaga-lembaga politik di satu sisi dan masyarakat dengan proses politik di sisi yang lain. Contoh proses politik adalah sosialisasi, partisipasi, rekrutmen, komunikasi dan konflik.

Maurice Duverger

Sosiologi politik adalah ilmu tentang kekuasaan, pemerintahan, otoritas, komando dalam semua level masyarakat manusia, yang bukan saja di dalam masyarakat nasional, tetapi juga masyarakat lokal dan masyarakat internasional.

Sherman dan Kolker

Sosiologi politik adalah ilmu yang mempelajari partisipasi dalam pembuatan keputusan tentang suatu kehidupan yang luas dan yang sempit.

Michael Rush dan Philip Althoff

Sosiologi politik adalah proses hubungan antara masyarakat dan politik, hubungan antara struktur-struktur sosial, dan hubungan antara tingkah laku sosial dan tingkah laku politik. Fokus kajiannya adalah sosialisasi politik, partisipasi politik, rekrutmen politik, dan komunikasi politik.

Tom Bottomore

Sosiologi politik adalah kajian tentang demokrasi, kelas sosial, gerakan sosial, partai politik, aksi politik, perubahan politik dan konflik, negara, nasionalisme, pembangunan dan politik global.

Keith Faulks

Studi tentang hubungan kekuasaan yang saling tergantung (interdependen) antara negara dan masyarakat sipil.

Rafael Raga Maran

Pertama, sosiologi politik adalah studi tentang Negara. *Kedua*, sosiologi politik adalah studi tentang kekuasaan pada berbagai level masyarakat.

Keith Faulks memberikan pemahaman yang lebih sederhana mengenai definisi sosiologi politik. Perhatikan tabel di bawah ini:

Objek Sosiologi	Sosiologi Politik	Objek Politik
Masyarakat sipil	Sosialisasi politik Rekrutmen politik Komunikasi politik Partisipasi Politik Konflik politik Demokrasi Budaya politik Gerakan sosial Perubahan politik	Aktor politik, lembaga negara dan partai politik yang memiliki kapasitas sehingga berkuasa dalam negara.
www.anneahira.com	latansablog.wordpress.com	http://ericopieter.blogspot.com/

Pada gambar di atas terlihat masyarakat dan elite politik terhubung oleh kegiatan sosiologi politik. Masyarakat dan elite politik memiliki hubungan saling ketergantungan satu sama lain.



PERDEBATAN TENTANG FOKUS KAJIAN SOSIOLOGI POLITIK

Secara umum fokus studi sosiologi politik menurut sosiologi terbagi menjadi dua pandangan. *Pertama*, sosiologi politik adalah cabang sosiologi yang membahas masalah *kekuasaan yang berkaitan dengan Negara*. Karena itu unit analisisnya adalah negara.

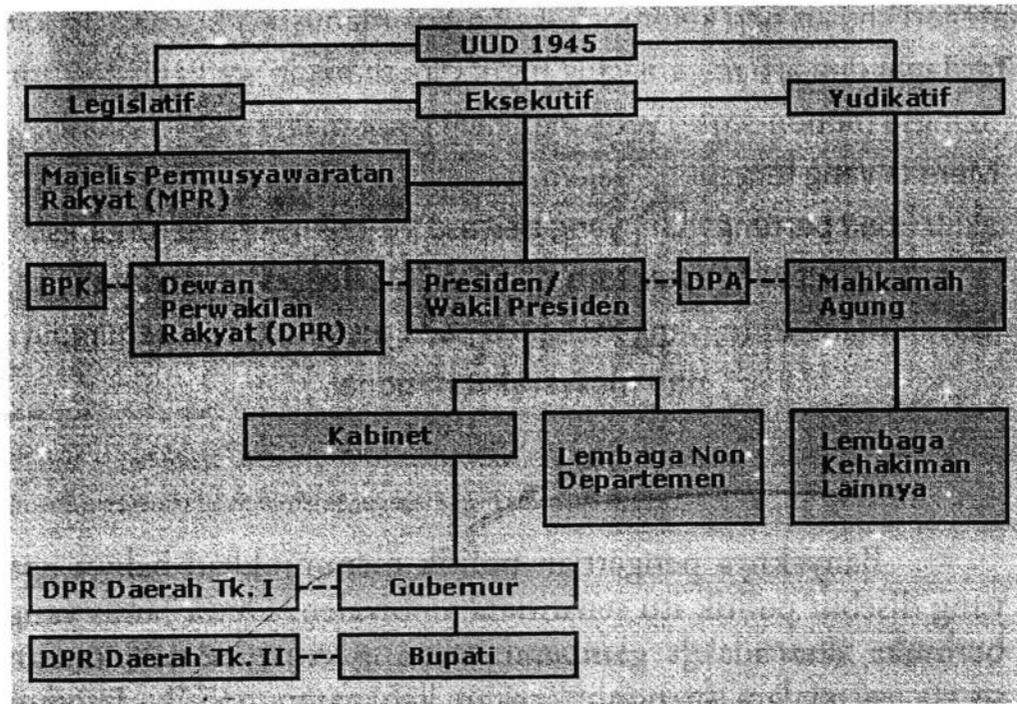
Negarawan Indonesia



<http://ericopieter.blogspot.com/>

Apakah ini berarti kajian sosiologi politik sama dengan kajian politik? Tidak, politik membahas dua hal; yaitu teori politik dan administrasi pemerintahan. Teori-teori politik antara lain membahas ide-ide tentang pemerintahan mulai Plato, Machiavelli, Rousseau sampai Karl Marx. Pokok bahasan administrasi pemerintahan terutama pada masalah struktur formal dan fungsi organisasi pemerintahan. Politik memfokuskan perhatiannya pada kekuasaan yang melekat pada organisasi-organisasi formal atau pada administrasi publik sehingga organisasi tersebut dapat berjalan efektif dan efisien.

Kajian Politik



<http://rinaldiy.blogspot.com/>

Politik dianggap sebagai pergolakan dan pertempuran, antara kelompok-kelompok dan individu yang ingin berkuasa atau mempertahankan dominasinya terhadap masyarakat dengan cara mengeksploitasinya. Sedangkan individu dan kelompok yang lain menentang dominasi dan tindak eksploitatif tersebut. Di sini politik merupakan sarana untuk mempertahankan hak-hak istimewa kelompok minoritas dari dominasi kelompok

mayoritas. Politik juga dipandang sebagai suatu usaha untuk menegakkan ketertiban dan keadilan. Di sini kekuasaan dipakai untuk mewujudkan kemakmuran bersama dan melindungi kepentingan umum dari tekanan kelompok-kelompok tertentu. Artinya, politik merupakan sarana untuk mengintegrasikan setiap orang ke dalam komunitas dan menciptakan keadilan seperti yang dicita-citakan oleh Aristoteles.

Di sini kata "Politik" dipakai dalam konotasinya yang biasa, yaitu yang berhubungan dengan negara. Kata "negara" mengacu pada kategori khusus dari kelompok-kelompok manusia atau masyarakat. Terdapat dua arti negara yang patut diperhatikan, yaitu (1) Negara bangsa (*nation-state*) yang mengacu pada masyarakat nasional. Mereka yang tergabung dalam komunitas politik ini muncul pada akhir abad pertengahan, yang dewasa ini paling kuat terorganisir sekaligus paling utuh terorganisasi. (2) Negara pemerintah (*government-state*) yang mengacu pada penguasa dan pemimpin dari masyarakat nasional.

Banyaknya pengertian politik menunjukkan bahwa apa yang disebut politik itu senantiasa ambivalen. Dewa Janus yang bermuka dua adalah gambaran tentang citra kekuasaan dan secara mendalam mengungkapkan kebenaran politik. Di satu sisi, kekuasaan dijadikan alat untuk mendominasi orang atau pihak lain. Di sisi yang lain, kekuasaan dijadikan sarana untuk menjamin ketertiban sosial tertentu atau sebagai alat pemersatu. Kedua paham ini merupakan dasar teoritis bagi pembicaraan tentang sosiologi politik. Namun perlu dicatat, bahwa tidak ada suatu teori umum tentang sosiologi politik yang dapat diterima oleh semua sarjana terkait. Merumuskan teori umum tentang sosiologi politik merupakan tantangan sekaligus peluang bagi sarjana sosiologi politik kontemporer.

Sosiologi politik memfokuskan kajian pada perilaku sosial yang berkembang pada saat masyarakat memberi respon terhadap sistem birokrasi. Masyarakat sebagai pemberi respon birokrasi inilah yang menjadi bahagian kajian sosiologi politik.

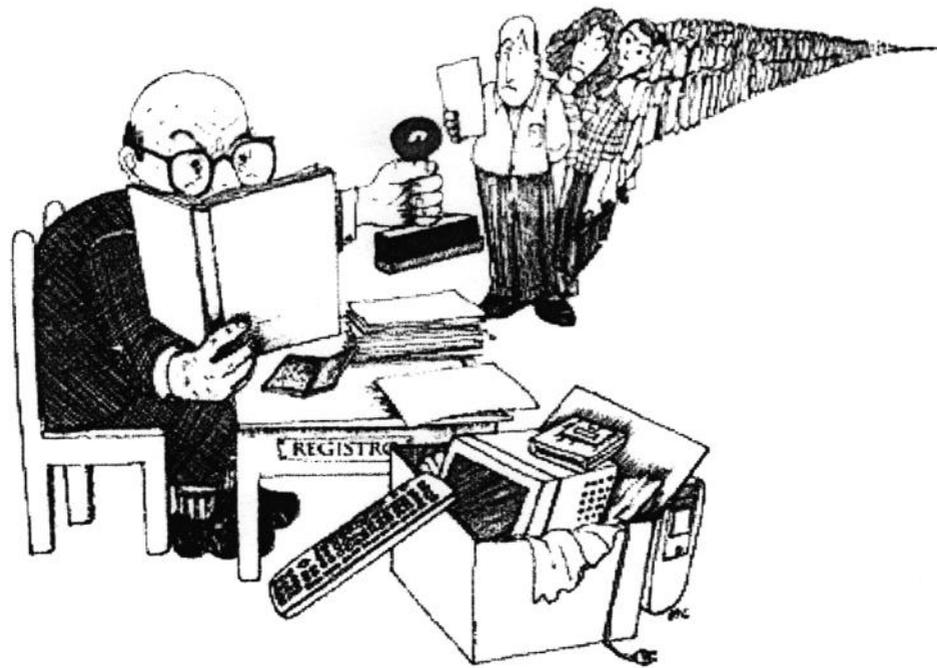


Image masyarakat dan birokrat sebagai kajian sosiologi politik

Pandangan ini menghendaki agar ruang lingkup kekuasaan dalam sosiologi politik tidak terlalu luas dan tanpa arah. Gambar di atas menekankan kajian sosiologi politik tidak pernah lepas dari keterkaitannya dengan Negara. Sebab hampir semua institusi memiliki kaitan dengan negara, dibandingkan dengan sesama organisasi privat. Perusahaan -misalnya- merupakan persoalan hubungan antara karyawan dengan pengusaha, upah buruh minimum, pemilikan saham, dan sebagainya. Namun pada aspek tertentu, misalnya pembayaran pajak, izin usaha dan pendirian, penentuan upah tetap menjadi persoalan negara. Itu sebab hubungan perusahaan dan negara merupakan kajian sosiologi politik. Bahkan dewasa ini hubungan

organisasi privat dengan negara semakin kuat sebab seluruh proses pengambilan berbagai keputusan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar anggota masyarakat menjadi tidak dapat dilepaskan dengan hukum dan birokrasi Negara.

Pandangan *kedua* mengatakan bahwa sosiologi politik seharusnya bukan hanya mempelajari atau membahas masalah kekuasaan yang berkaitan dengan Negara, melainkan juga pada unit-unit kehidupan sosial yang lain yang lebih kecil, seperti: keluarga, asosiasi atau organisasi. Ini berarti jika pandangan pertama berbicara pada level makro saja (hubungan negara dan masyarakat), sedangkan pandangan kedua berbicara pada level makro sekaligus mikro (negara, hubungan negara dan masyarakat, masyarakat itu sendiri).

Menurut pengertian yang lebih modern, sosiologi politik adalah ilmu tentang kekuasaan, pemerintah, otoritas, komando, di dalam semua masyarakat manusia, tidak hanya di dalam masyarakat nasional. Leon Daguít, seorang ahli hukum, berkebangsaan Perancis menyatakan terdapat perbedaan antara pemerintah dan yang diperintah. Katanya, dalam setiap kelompok manusia, mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar, mulai dari yang rapuh hingga yang paling stabil terdapat orang yang memerintah dan mereka yang mematuhi. Terdapat mereka yang membuat keputusan dan orang-orang yang menaati keputusan yang bersangkutan. Perbedaan tersebut merupakan fenomena politik yang fundamental yang dijelaskan melalui studi perbandingan pada setiap masyarakat dan pada setiap tingkatan sosial (Duverger, Maurice. 2001).

Pandangan di atas berpijak pada suatu pemahaman bahwa jika kekuasaan adalah objek sosiologi politik, maka hampir semua bentuk hubungan sosial ditemukan kekuasaan dan struktur kekuasaan. Dalam keluarga batih misalnya, terdapat anggota keluarga tertentu yang paling berkuasa atau paling

determinan dalam proses pengambilan keputusan. Sementara itu anggota-anggota keluarga lainnya hanya dalam posisi subordinasi atau di pinggiran (dipinggirkan). Demikian pula dalam keluarga besar, ada orang-orang tertentu yang secara adat diposisikan lebih tinggi dan diberi peranan lebih besar. Hampir semua persoalan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar dasar ditaruh dan dipertaruhkan kepada orang-orang semacam itu.

Kekuasaan dalam masyarakat adat sebagai kajian sosiologi politik



<http://saliwanovanadiputra.blogspot.com/2011/04/sejarah-kerajaan.html>

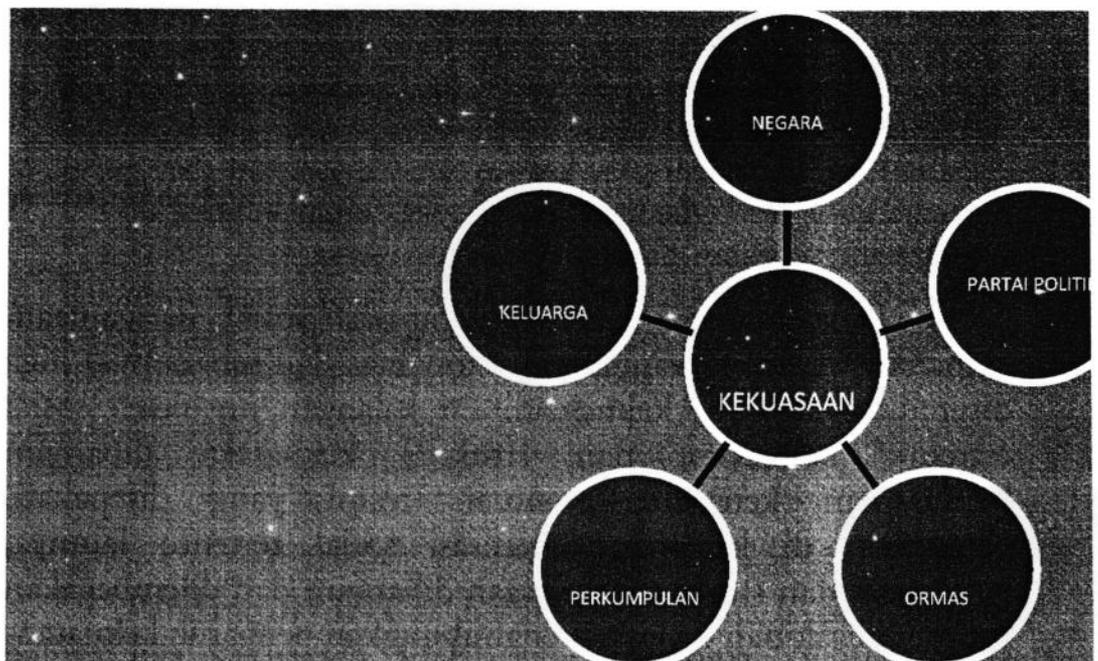
Pada berbagai macam organisasi sosial (keagamaan, kemahasiswaan, kewanitaan, kriminalitas dan sebagainya) juga ditemukan struktur kekuasaan. Di kalangan organisasi sosial tertentu kekuasaan dan struktur kekuasaan dibangun berdasarkan ketentuan-ketentuan resmi yang disepakati. Kemudian di kalangan organisasi sosial tertentu lainnya, kekuasaan dan struktur kekuasaan dibangun dan dilembagakan melalui keyakinan dengan menghubungkan pengaruh kekuatan-kekuatan gaib.

Ini mengukuhkan pendapat bahwa konsep kekuasaan tidak hanya melekat pada Negara, dengan kata lain tidak hanya

menjadi kajian ilmu politik. Pokok bahasan sosiologi politik menjadi lebih luas karena pada dasarnya fenomena yang dikaji berada pada seputar masalah pengaruh dan pihak yang dipengaruhi (kekuasaan dan yang pihak yang berkuasa). Hal yang perlu diingat adalah pandangan ini tidak mengatakan bahwa bentuk kekuasaan adalah sama pada semua kehidupan sosial; sebaliknya diakui bentuk-bentuk hubungan sosial yang berbeda bisa melahirkan kekuasaan yang berbeda pula.

Apa keuntungan mengikuti konsep kekuasaan semacam itu? Salah satu keuntungannya adalah dapat mempelajari politik yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai macam unit kehidupan sosial. Dapat mempelajari politik dalam kehidupan masyarakat yang barangkali tidak mempunyai Negara. Dapat pula mempelajari politik dalam keluarga, organisasi bahkan perusahaan. Dengan kata lain konsep politik semacam itu membantu meningkatkan kesadaran, bahwa persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pengaruh dan kekuasaan terdapat dalam semua kehidupan, atau tidak hanya melekat dalam Negara saja.

Kekuasaan pada semua level kehidupan masyarakat



Satu hal yang harus diingat, bahwa fokus perhatian sosiologi politik adalah perilaku yang berkaitan dengan kekuasaan. Perilaku politik haruslah ditempatkan sebagai proses ketika dalam masyarakat terjadi atau ditemukan usaha melakukan kontrol, monopoli atau memaksa. Hubungan-hubungan sosial yang tidak simetris pada umumnya mempunyai muatan atau dimensi politik.

Pertanyaan selanjutnya adalah mengapa hubungan asimetris memiliki muatan atau dimensi politik dapat tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat? Ada sebagian masyarakat yang menganggap kondisi seperti itu sebagai suatu hal yang wajar sehingga harus diterima begitu saja. Kepatuhan suatu kelompok kepada kelompok lainnya seperti buruh kepada majikan, petani miskin kepada petani kaya, boleh jadi karena ketergantungan ekonomi. Ketergantungan itu seringkali demikian besar sehingga kelompok yang berkuasa mampu menciptakan sanksi ketika kehendaknya tidak dipatuhi.

Bila sanksi tidak efektif maka kelompok yang berkuasa seringkali membangun ideologi tertentu yang mampu melegitimasi kekuasaannya. Ideologi tersebut terartikulasikan sedemikian rupa sehingga dalam benak anggota masyarakat yang dikuasai tumbuh persepsi bahwa apa yang dikehendaki kelompok berkuasa memang pantas dan layak untuk dipatuhi. Berkembang harapan bahwa kelompok yang berkuasa akan mampu menciptakan kondisi yang lebih baik. Dengan demikian hubungan-hubungan sosial yang tidak simetris sebenarnya bukan hanya karena lemahnya posisi kelompok tertentu yang dikuasai, tetapi juga akibat dari berkembangnya persepsi dan harapan yang telah diuraikan tadi. Persepsi dan harapan semacam itu disosialisasikan melalui lembaga-lembaga sosial yang ada dalam masyarakat, sehingga posisi kelompok yang berkuasa menjadi mapan dan kekuasaan yang ada pada genggamannya lestari dan tidak mudah digugat.

Setiap organisasi mempunyai ketentuan-ketentuan yang diharapkan dapat mengatur hubungan sosial yang terjalin di antara anggotanya. Pada organisasi yang sangat ketat misalnya ketentuan dibuat tidak hanya memperjelas posisi anggotanya

melainkan juga klarifikasi hak dan kewajiban yang harus mereka lakukan. Ketentuan itu dibuat untuk mengakomodasi berbagai macam kepentingan dalam berbagai situasi. Dengan ketentuan semacam itu diharapkan segenap anggota organisasi bisa mengerti dan memahami dimana posisinya dan apa yang harus dilakukan, sehingga tidak saling berbenturan satu sama lain. Dalam kenyataannya sebenarnya tidak ada ketentuan yang sempurna atau memuaskan semua pihak. Sebuah ketentuan kerap kali ketinggalan karena tidak mampu mengakomodasi kepentingan anggota organisasi. Masalah-masalah baru terus muncul sehingga harus dibuat ketentuan baru lagi.

Gambar ketidakpuasan hubungan buruh dan majikan



<http://www.cahayaumat.net/>

Apabila terjadi ketidakpuasan maka konsekwensi yang timbul adalah munculnya diskusi seru antara kalangan yang menerima dan menolak suatu keputusan. Diskusi itu biasanya menegosiasikan berbagai macam kebutuhan dan kepentingan semua pihak. Ketika Negara mengambil keputusan, para politisi perlu mempertimbangkan sistem pemerintahan yang berlaku, peraturan perundang-undangan sebelumnya serta perkiraan

respon masyarakat terhadapnya (yuridis, filosofis dan sosiologis). Kegiatan ini sangat rumit itu sebabnya dinamakan aktivitas politik, karena memperbincangkan apa yang terjadi, apa yang seharusnya dilakukan, dan berusaha memperbaiki suatu kesalahan.

TITIK PANDANG SOSIOLOGI POLITIK

Titik pandang di sini artinya adalah pendekatan atau metode yang dipakai oleh para ahli sosiologi politik untuk mempelajari masalah-masalah yang menjadi objek perhatian mereka. Biasanya para ahli sosiologi politik mempelajari masalah-masalah seperti tersebut di bawah ini:

- a. Kondisi-kondisi apakah yang menimbulkan tertib politik atau kekacauan politik dalam masyarakat?
- b. Mengapa sistem-sistem politik tertentu dianggap sah atau tidak sah oleh warga negara?
- c. Mengapa sistem-sistem politik tertentu stabil, sedangkan yang lainnya tidak?
- d. Mengapa ada pemerintahan yang demokratis, dan mengapa ada yang totaliter? Mengapa pula ada pemerintahan yang merupakan kombinasi antara keduanya?
- e. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan variasi pada sistem kepartaian, taraf partisipasi politik, dan angka rata-rata, pemilihan suara?

Untuk memecahkan masalah-masalah tersebut dipergunakan berbagai cara pendekatan seperti pendekatan historis, pendekatan komparatif, institusional, dan pendekatan behavioral. Melalui pendekatan historis kita berusaha mencari karya para ahli sosiologi politik klasik untuk menemukan konsep-konsep dan minat-minat tradisional dari sosiologi politik sebagai suatu disiplin intelektual. Dengan cara ini kita bisa menemukan bagaimana jawaban-jawaban mereka atas permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Dengan kata lain,

pendekatan ini memberikan suatu perspektif yang diperlukan bagi studi-studi yang sama, baik dalam pengertian kontekstual maupun temporal.

Melalui pendekatan komparatif kita mempelajari gejala-gejala sosial politik dari suatu masyarakat tertentu untuk menyorot fenomena yang kita hadapi. Pendekatan semacam ini dipergunakan antara lain oleh Ostrogorski dan Michels dalam studi mereka tentang partai-partai politik, dan diterapkan pada studi lingkungan oleh Almond dan kawan-kawan beserta Lipset.

Kedua pendekatan di atas, sering digunakan oleh peneliti sosiologi politik. Berbeda dengan pendekatan institusional, pendekatan ini dianggap tidak memadai dan tidak realistis, sebab studi ini mengabaikan realitas tingkah laku politik. Masalahnya ialah, bahwa pendekatan ini mengkonsentrasikan diri pada faktor-faktor konstitusional dan legalistik. Dengan kata lain, institusi-institusi sosial atau lembaga-lembaga sosial merupakan unit dasar analisis. Dengan demikian orang memberikan tekanan yang berlebihan pada pandangan bahwa tingkah laku politik itu selalu berlangsung dalam kerangka institusional. Seringkali kaitan tingkah laku dengan institusinya tidak dijelaskan secara memadai.

Pendekatan behavioral (pendekatan perilaku) dianggap menjadi solusi bagi kekeliruan-kekeliruan yang terdapat pada pendekatan-pendekatan lainnya. Pendekatan behavioral menggunakan individu sebagai dasar dari analisis. Di sini fakta dan nilai dipisahkan, dan orang membuat generalisasi berdasarkan prinsip verifikasi. Meskipun demikian pendekatan ini dikritik berdasarkan dua alasan. *Pertama*, para pengguna pendekatan ini dianggap terlalu kaku dalam melakukan analisis politik dan sosial. Sikap kaku itu dipertahankan demi standar-standar yang tinggi yang dipentingkan dalam pendekatan ini. *Kedua*, pendekatan ini mengabaikan segi-segi yang merupakan kelebihan dari pendekatan-pendekatan lain. Padahal tidak ada satu pendekatan yang paling baik dan sempurna. Bagaimanapun setiap pendekatan adalah parsial. Karena itu berbagai pendekatan itu bisa saling melengkapi. Menggabungkan beberapa

pendekatan dapat menghasilkan suatu pengetahuan yang lebih utuh, misalnya tentang suatu fenomena sosial politik.

TEORI SOSIOLOGI POLITIK

Pada bidang sosiologi politik terkenal teori sistem yang beranggapan bahwa semua gejala sosial merupakan bagian dari pola tingkah laku yang konsisten, internal, dan reguler, dapat dilihat dan dibedakan. Itulah yang disebut sistem sosial yang terdiri dari subsistem-subsistem yang saling bergantung, seperti halnya kaitan antara ekonomi dan politik. Salah satu tokoh terkemuka dalam teori sistem adalah Talcot Parsons yang menulis buku *The Sosial Sistem* (1951).

Parsons dan kawan-kawan, khususnya Marion Levy dan Robert K. Merton mengembangkan pendekatan fungsional, yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan fungsionalisme-struktural. Menurut pandangan ini, struktur-struktur sosial yang menentukan peranan-peranan dengan pola-pola perilaku yang tetap yang oleh masyarakat diharapkan dari seorang dokter, politisi, petani, ibu rumah tangga, orang beragama, warga negara, dan sebagainya. Keunggulan individu melenyap, di balik peranan-peranan yang telah dikembangkan oleh masyarakat. Pelembagaan itu diadakan demi suatu kesatu-paduan (integrasi) dan orde masyarakat. Peranan-peranan resmi itu dipakai sebagai mekanisme yang mengintegrasikan orang ke dalam kesatuan sosial.

Namun fungsionalisme-struktural pun tidak luput dari kritik serta kecaman, karena dianggap tidak mampu secara tepat memperhitungkan perubahan yang sistematis; dan secara ideologis jadi bias, karena menjurus pada arah yang statis atau pada konservatisme.

Alternatif bagi fungsionalisme-struktural ditawarkan oleh David Easton yang menulis buku *The Political Sistem, A Frameworkfor Political Analysis and A Sistem Analysis of Political Life* (1965). Alternatif ini menawarkan analisis input-output. Secara khusus Easton memperhatikan masalah bagaimana caranya suatu sistem politik bisa bertahan hidup dan

faktor-faktor apakah yang menyebabkan perubahannya. Ia menyatakan bahwa orang perlu memberikan sumbangan-sumbangan tertentu kepada sistem politik berupa masukan-masukan (input), yang diwujudkan melalui pernyataan tuntutan-tuntutan perubahan, melalui pernyataan dukungan atas sistem yang ada. Dengan demikian akan dikeluarkan keputusan-keputusan otoritatif, yang pada gilirannya akan mendapat umpan-balik (feedback) dari para warga masyarakat yang bersangkutan.

Berdasarkan teori Easton ini, Gabriel Almond mengembangkan suatu pendekatan yang dikenal dengan nama pendekatan perkembangan (*developmental approach*) terhadap problem-problem sosial politik. Almond berusaha menghubungkan lembaga-lembaga dengan proses-proses, seperti proses politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain.

Metode yang juga sering diandalkan dalam studi sosiologi politik adalah metode kuantitatif. Termasuk di sini penggunaan survei-survei statistik dan pengumpulan-pengumpulan data, seperti yang dipergunakan pada studi-studi mengenai ekologi politik. Dalam rangka itu para ahli sosiologi politik berusaha sungguh-sungguh untuk mendapatkan wawasan melalui survei-survei dan wawancara intensif.

Penggunaan teori-teori dan model-model di atas tentu saja sangat diperlukan untuk memperoleh garis-garis pedoman bagi penelitian dan untuk menghasilkan penjelasan-penjelasan yang memadai tentang gejala-gejala atau masalah-masalah yang sedang dipelajari. Di sini teori dipakai untuk mengorganisir segala sesuatu yang peneliti ketahui, atau segala sesuatu yang diduga diketahui. Atau untuk merdeka-reka jawaban dari suatu pertanyaan atau isu yang diajukan secara eksplisit.

Teori berfungsi untuk mengarahkan peneliti memahami suatu konsep umum tentang fenomena di mana seorang ilmuwan bekerja. Teori bekerja seperti “bagaimana dunia itu disatukan dan bagaimana dunia itu bekerja”. Artinya, teori memberi panduan umum tentang kerangka utama dari suatu fenomena yang sedang diteliti. Teori berisikan ide-ide utama tentang

hakikat dari unit-unit sosial yang mencakup pola relasi-relasi di antara unit sosial (Raga Margan, Rafael. 2001).

MANFAAT SOSIOLOGI POLITIK

Menurut Wasburn ada tiga manfaat sosiologi politik; *manfaat analitis, manfaat praktis dan manfaat moral*. Sosiologi politik dinyatakan memiliki manfaat analitis karena di dalamnya menawarkan berbagai macam teori dan metodologi yang dapat dipergunakan untuk membaca fenomena politik yang riil berkembang dalam masyarakat. Dalam sosiologi politik dibahas teori dan metodologi struktur kekuasaan dan distribusi kekuasaan yang ada dalam masyarakat termasuk juga sosialisasi politik, partisipasi politik, komunikasi politik, dan gerakan politik. Perbendaharaan pengetahuan tentang teori dan metodologi mengenai fenomena serta masalah semacam itu akan sangat membantu kita dalam mengidentifikasi mengapa suatu fenomena politik tertentu muncul dan berkembang dalam masyarakat. Di samping itu juga akan sangat membantu dalam membuat prediksi apa kira-kira yang kelak terjadi.

Selanjutnya sosiologi politik juga memiliki manfaat praktis karena di dalamnya juga dibahas berbagai macam strategi untuk mencapai tujuan politik. Ada di antara strategi-strategi tertentu yang tergolong efektif dan efisien untuk menjawab kepentingan politik tertentu, tapi ada pula yang di antaranya justru potensial menghadirkan konflik politik yang berkepanjangan. Kemudian ada di antara strategi-strategi tersebut yang tergolong efektif dan efisien untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat yang tergolong modern – industrial, tapi ada juga yang justru lebih relevan pada masyarakat agraris – tradisional.

Manfaat ketiga yakni manfaat moral maksudnya dengan memahami teori dan metodologi yang berkembang dalam sosiologi politik serta strategi-strategi yang tergolong efektif dan efisien dalam usaha memenuhi kepentingan politik atau mencapai tujuan politik dapat meningkatkan komitmen kerakyatan kita. Komitmen tersebut berkaitan dengan

“keberpihakan” yang ditempatkan sebagai tawaran bukan doktrin wajib yang harus diikuti. Karena itulah kita perlu berhati-hati memilih supaya dapat menghindari bentuk-bentuk monopoli dan eksploitasi (Sunyoto Usman, 2001).

BAB 2

KONSEP DAN TEORI KEKUASAAN

Bab ini merupakan lanjutan dari materi pertama mengenai definisi sosiologi politik yang berfokus pada konsep kekuasaan. Kekuasaan diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar mengikuti kehendaknya. Kemampuan ini ada pada diri individu, baik ketika ia bersama satu orang lainnya, kelompok kecil seperti keluarga, organisasi kemasyarakatan hingga pada level negara. Semakin besar kelompok yang mampu dipengaruhinya semakin ia memiliki kekuasaan. Tujuan utama dari bab ini adalah agar pembaca dapat mengenali berbagai jenis kekuasaan, sumber kekuasaan, teori-teori kekuasaan serta mampu menganalisis fenomena kekuasaan individu atau kelompok pada lingkungan sekitar.

Adapun materi yang akan dibahas meliputi sumber kekuasaan, kekuasaan pada masyarakat sederhana dan maju, pertumbuhan kekuasaan, struktur kekuasaan luwes dan ketat serta unsur yang terdapat dalam kekuasaan. Pada masing-masingnya akan ditampilkan ilustrasi, foto, gambar berkaitan serta peta konsep dan skema untuk mempermudah pemahaman pembaca.

DEFINISI KEKUASAAN

Kekuasaan adalah kemampuan untuk menguasai atau mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu. Kekuasaan juga diartikan kemampuan mengatasi perlawanan dari orang lain. Untuk memiliki kemampuan ini, ada yang dilakukan secara sah dan ada pula yang tidak sah. Menurut Max Weber, Seseorang dikatakan sah untuk berkuasa apabila ia memiliki kewenangan/otoritas dan legitimasi/hak dari pihak pemberi kekuasaan. Sedangkan kekuasaan dikatakan tidak sah apabila seseorang mempengaruhi orang lain dengan cara paksaan dan kekerasan.



Kekuasaan yang sah memiliki dimensi positif :

Didukung oleh orang lain, memiliki hak dan wewenang untuk mengatur orang lain



Kekuasaan yang tidak sah memiliki dimensi negatif:

Menggunakan kekerasan dan paksaan untuk mengatur pihak lain.

Apakah perbedaan pengaruh, kekuasaan dan wewenang?
Stephen K. Sanderson (2003) dalam Damsar (2010) membedakan 3 mekanisme politik :

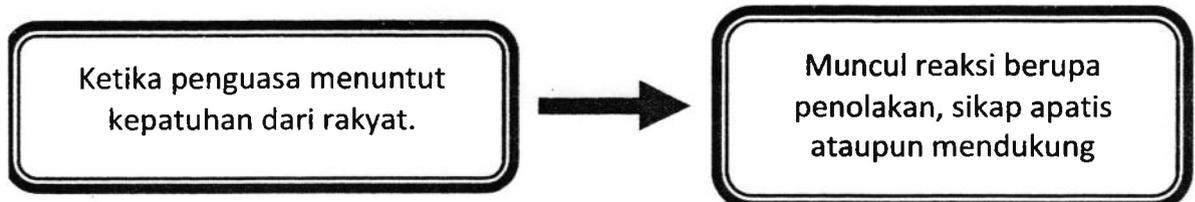
Pengaruh	Pengikutsertaan terhadap perilaku, saran, arahan seseorang secara sukarela, akibat interaksi yang erat, konstan dan terus-menerus.
Kekuasaan	Kemampuan mengendalikan perilaku orang lain termasuk mengatasi perlawanan baik menggunakan cara-cara persuasif ataupun paksaan.
Kewenangan	Kekuasaan yang diperoleh melalui komitmen psikologis, rasionalitas dan legalitas tertentu.

SUMBER-SUMBER KEKUASAAN

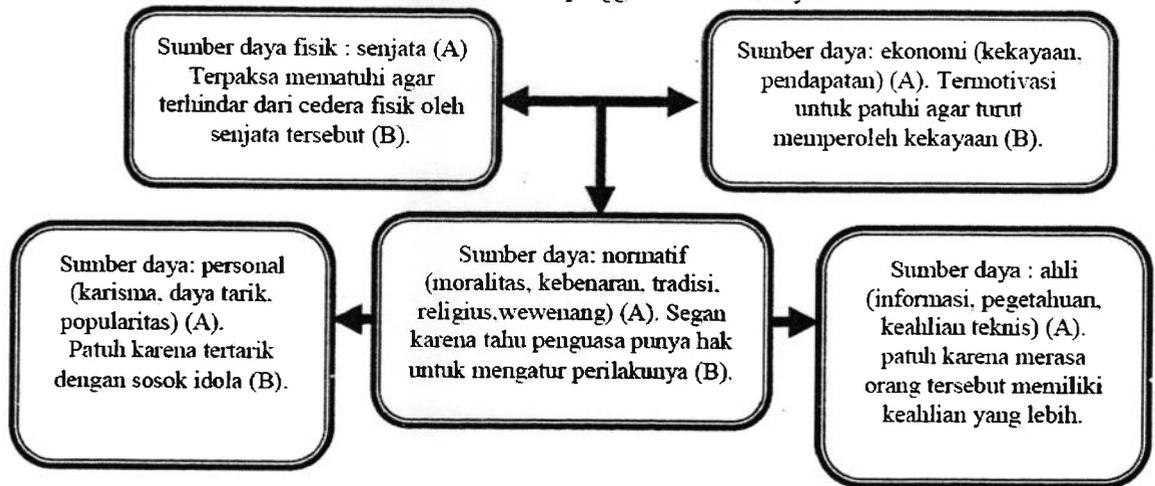
Sumber-sumber di bawah ini dapat dimiliki oleh individu maupun kelompok:

- Kekuatan militer, dimiliki oleh polisi untuk mampu menguasai kekerasan kriminal.
- Kekuatan ekonomi, seperti tanah, modal yang dapat menguasai tenaga kerja.
- Kekuatan politik, dimiliki politisi dan pejabat Negara yang berwenang atau berhak mengambil keputusan.
- Kekuatan ideologis (tradisional), dimiliki oleh tokoh adat yang menguasai sistem kepercayaan, nilai-nilai moral, pengetahuan agama sehingga mampu melakukan doktrinisasi dan propaganda.

Menurut Charles F. Andrain, terdapat beberapa sumber kekuasaan yang dapat dijadikan alat untuk mempertahankan serta memperoleh kekuasaan. Berikut bagan hubungan antara pemilik sumber daya (A) dengan mereka yang tidak punya sumber daya (B).



Lima sebab akibat penggunaan sumber daya



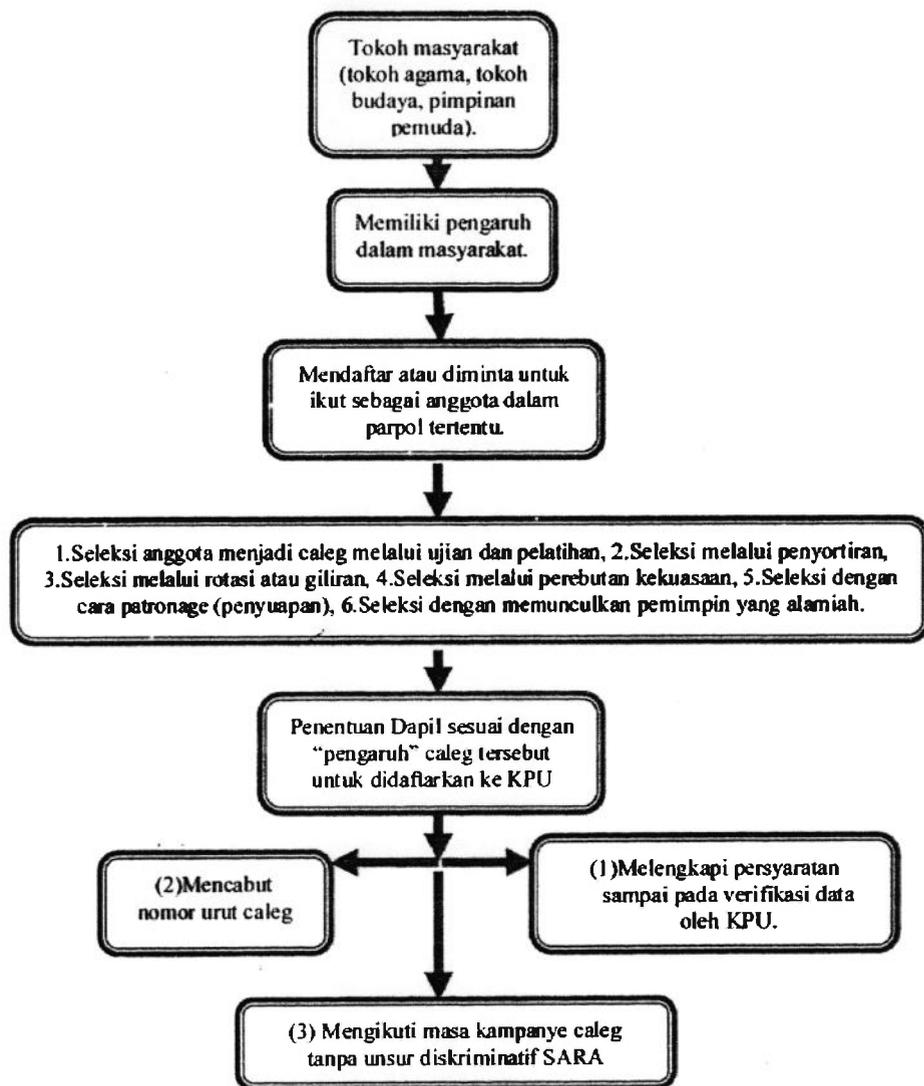
Sumber : Penulis

BAGAIMANA SESEORANG DAPAT MEMILIKI KEKUASAAN DALAM BIDANG POLITIK DENGAN MENJADI SEORANG LEGISLATOR?

Orang yang menjadi wakil rakyat (legislatif) tentu memiliki “pintu” atau saluran ke dalam dunia politik sehingga mampu memperoleh posisi tersebut. Pintu pertama adalah dengan mengikuti rekrutmen untuk menjadi anggota partai politik. Proses ini dikenal dengan istilah rekrutmen politik untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan. Partai politik sendiri melakukan penyeleksian terhadap anggota yang akan didaftarkan sebagai perwakilan calon legislatif dari partai politik tersebut.

Selanjutnya partai perlu menentukan daerah pemilihan (dapil) dari calon tersebut. Pemilihan daerah ini terkait sejauhmana pengaruh dari calon tersebut dalam masyarakat setempat. Hal ini penting diperhitungkan sebab akan berpengaruh pada jumlah suara yang akan didapatkan. Partai politik kemudian mendaftarkan calon dari setiap partai politik ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), sesuai jadwal yang telah ditentukan. Selanjutnya mereka mengikuti proses verifikasi data, menentukan nomor urut sesuai daerah pemilihan atau dapil, mengikuti proses kampanye terbuka bagi setiap calon untuk

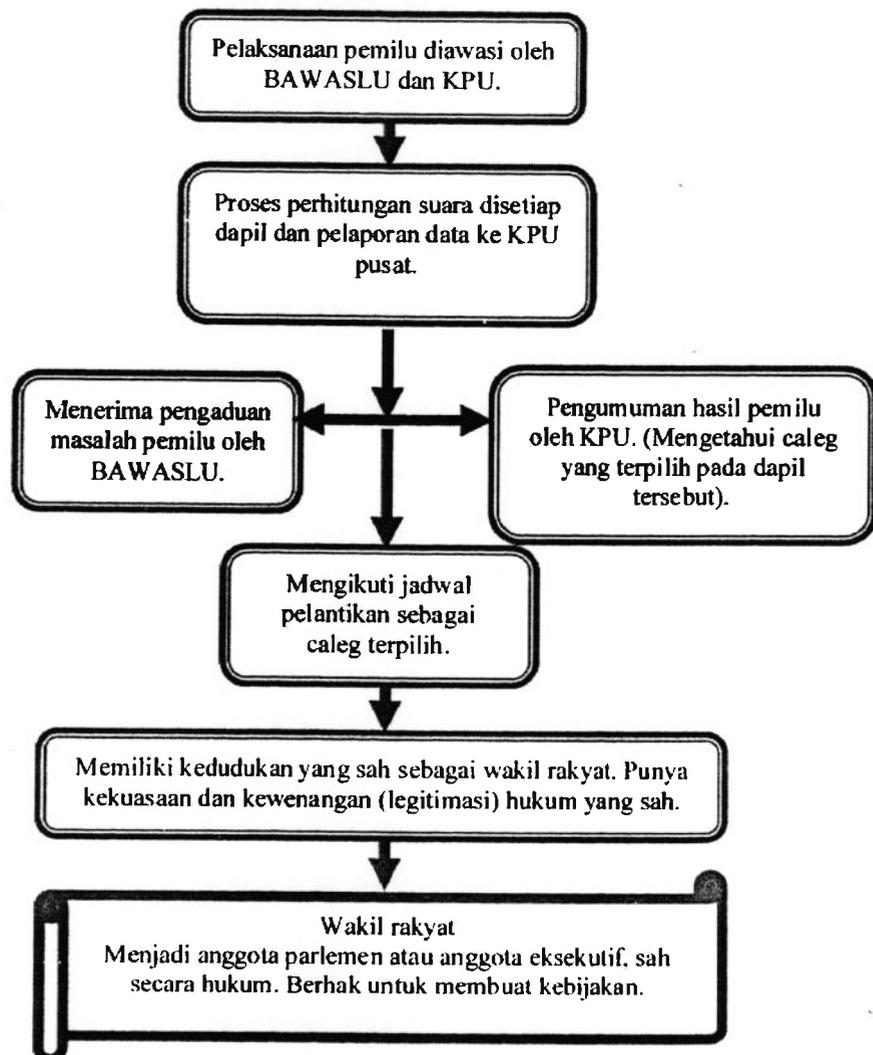
menarik simpati dari rakyat. Caleg tidak dibolehkan melakukan kampanye yang memiliki unsur SARA atau membagikan uang pada masyarakat (*money politics*), mengikuti masa tenang setelah kampanye terbuka, dengan melakukan pencabutan baliho dan pamflet atau atribut kampanye lainnya. Tahapan dan proses ini ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), wajib diikuti oleh setiap calon partai politik karena jika tidak akan mendapatkan sanksi dari Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU).



Setiap partisan politik mengharapkan pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Prinsip ini penting diterapkan terutama ketika penghitungan suara yang diperoleh oleh setiap calon dari partai

politik. Proses ini menentukan siapa-siapa saja wakil rakyat yang menang dan dari partai apa ia berasal. Bagi mereka yang merasa tidak puas, terdapat mekanisme pengaduan kepada lembaga Bawaslu yakni tiga hari setelah hasil pemilu diumumkan. Kesempatan ini dapat diambil bagi pihak yang merasa ada kecurangan dari lawan politiknya.

Setelah seluruh proses selesai maka ditentukan hari pelantikan bagi calon yang telah terpilih. Setelah dilantik, maka ia memiliki wewenang, hak dan kewajiban serta kekuasaan dalam pengambilan keputusan. Keseluruhan proses ini disebut sebagai upaya mendapatkan kekuasaan secara sah.



Sumber : Penulis

PENDAPAT PARA AHLI TERKAIT PEMIKIRAN SOSIOLOGI TENTANG KEKUASAAN

a. Max Weber

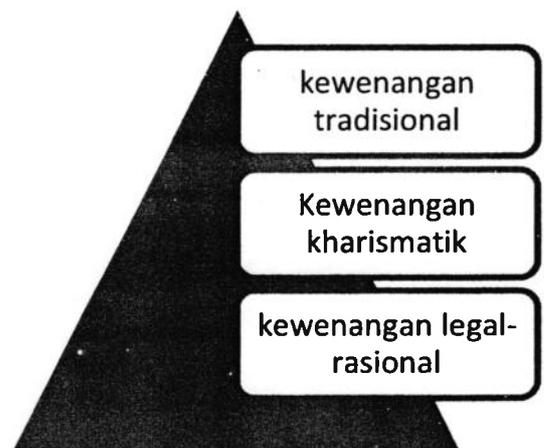
Menurut Max Weber, terdapat perbedaan antara kekuasaan (kewenangan) yang sah dengan kekuasaan yang dilandasi oleh paksaan atau tidak melalui kewenangan. Ia menyatakan, pada dasarnya kekuasaan itu netral, ia terbagi dua; kewenangan (dimensi positif dari kekuasaan) dan paksaan (dimensi negatif dari kekuasaan). Letak dari perbedaan tersebut dilihat dari cara mendapatkan kekuasaan serta penggunaan kewenangan tersebut. Dalam hal ini Weber membuat 3 tipeologi kekuasaan, yaitu:

Kewenangan tradisional	Kewenangan karismatik	Kewenangan legal-rasional
1. Kewenangan yang didasarkan pada tradisi, kebiasaan, kekudusan aturan dan keutamaan zaman dulu.	1. Kewenangan yang didapatkan seseorang karena memiliki kualitas kepribadian individu (extraordinary) dan diperlakukan sebagai orang yang dianugerahi kekuatan dan kualitas supranatural, superhuman, dan exceptional.	1. Kewenangan yang didasarkan atas komitmen terhadap seperangkat aturan yang diundangkan secara resmi dan diatur secara impersonal.
2. Misalnya : seorang penghulu Minangkabau memiliki kewenangan karena ada tradisi, seperti masyarakat Jawa mengenal ratu adil.	2. Misalnya: Mahatma Gandhi dari India yang memiliki pengaruh melalui kharismanya yang tergambar sebagai pembawa kedamaian bagi	2. Misalnya: kewenangan seorang bupati untuk mengatur jajarannya di kabupaten maka perintahnya tersebut akan diikuti selama memangku jabatan tersebut.
3. Pembagiannya: a. Gerontokrasi (kewenangan pada orang yang lebih tua).		

b. Patriarkalisme (memiliki prioritas warisan).	umat manusia, serta semangat hidup di atas kaki sendiri atau mandiri.	
c. Patrimonial (pengawai pemerintahan).	Kewenangan tersebut tergambar dari kharismanya.	

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa kewenangan seseorang bersumber dari kharisma yang ada dalam dirinya sehingga memiliki kepribadian yang berkualitas. Selain itu kewenangan juga bersumber dari usaha untuk mendapatkannya melalui rasional-legal. Ketiga kewenangan tersebut dapat digunakan secara berkombinasi antara satu dengan yang lainnya. Misalnya: kombinasi ketiga kewenangan terlihat dari sosok Sultan Hamengkubuwono dari daerah Yogyakarta. Beliau merupakan sultan yang memiliki kharisma dalam masyarakat Jawa. Gelar sultan tersebut sudah menjadi tradisi yang diwarisi secara turun-temurun. Di samping itu kedudukan sebagai gubernur Yogyakarta sah secara hukum karena keistimewaan yang diberikan pada pemerintahan daerah tersebut melalui peraturan perundang-undangan. Berdasarkan contoh ini terlihat adanya kombinasi ketiga kewenangan tersebut.

Kombinasi ketiga kewenangan yang dimiliki Sri Sultan Hamengkubuwono ke X



b. Bertand Russel

Menurut Bertand, kekuasaan merupakan hasil pengaruh yang diinginkan. Ia wujud karena ada dorongan atau motivasi bagi seorang manusia untuk memperoleh atau memegang kekuasaan. Dorongan tersebut eksplisit/terlihat bagi pimpinan yang ingin berkuasa serta implisit/tidak terlihat bagi orang-orang lain yang bersedia mengikuti sang pemimpin tersebut. Bertand mengelompokkan kekuasaan menjadi 3 bagian, di antaranya:

Kekuasaan tradisional	Kekuasaan revolusioner	Kekuasaan tanpa persetujuan.
1. Kekuasaan yang didasarkan pada tradisi, kepercayaan atau kebiasaan.	1. Kekuasaan yang bertumpu pada suatu kelompok yang besar.	1. Didasarkan pada dorongan dan hasrat akan kekuasaan individu atau kelompok tertentu.
2. Cakupannya meliputi kekuasaan religius dan kekuasaan raja.	2. Dipersatukan oleh suatu kepercayaan, program, atau perasaan protestanisme, komunisme atau hasrat akan kemerdekaan nasional.	2. Kekuasaan terhadap pengikutnya diberikan melalui rasa takut, bukan dengan kerjasama yang aktif.
3. Kekuasaan religius berkaitan dengan pemimpin agama.		3. Lebih mendominasi sikap pemimpin yang otoriter terhadap menjalankan kemauannya pada rakyat yang dipimpin tanpa ada proses demokrasi.
4. Kekuasaan raja berhubungan dengan kedudukan seseorang sebagai raja.		

c. Charles F. Andrain

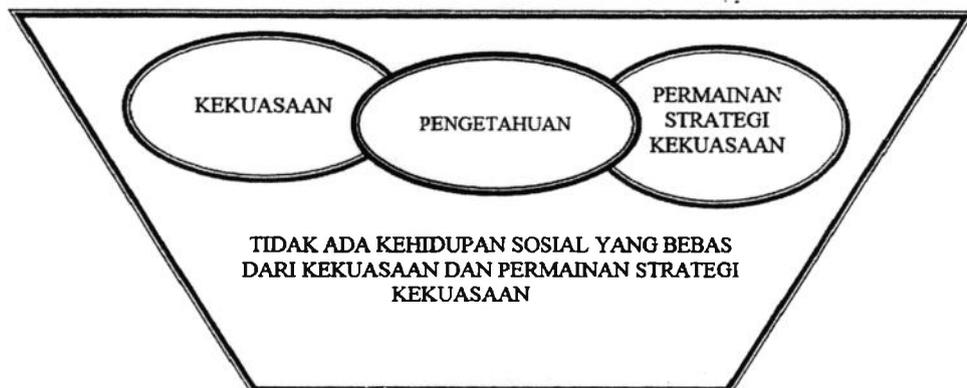
Kekuasaan diperoleh melalui penggunaan sejumlah sumber daya (aset atau kemampuan) untuk memperoleh kepatuhan dari orang lain. Pemegang kekuasaan menjalankan fungsi untuk mengontrol sejumlah orang. Orang yang menjadi penguasa bisa berasal dari individu atau dari kelompok, begitu

juga dengan objek kekuasaan bisa satu kelompok atau lebih. Setiap tuntutan yang dikeluarkan oleh pemegang kekuasaan, mulanya ditentang atau apatis. Namun terdapat pula yang mendukung. Pada kondisi tersebut maka seorang penguasa harus mencoba untuk melakukan mobilisasi, koordinasi dan penanggulangan atas penolakan dalam pelaksanaan kekuasaan.

d. Michel Foucault

Menurut Foucault, keterkaitan antara pengetahuan dengan kekuasaan begitu dekat dan saling mempengaruhi. Hal ini tergambar dari pendapat Foucault bahwasanya pengetahuan itu sendiri merupakan inti dari kekuasaan. Ia menyatakan, kekuasaan itu bisa datang dari mana-mana, karena pemikiran serta pengetahuan seseorang. Penggunaan kekuasaan berlangsung karena pilihan seseorang untuk berkuasa atau dikuasai. Di dalam kekuasaan terdapat kebebasan untuk memilih, menjadi penguasa atau dikuasai. Bagi mereka yang ingin berkuasa harus cerdas untuk memikirkan bagaimana mendapatkan kepatuhan daripada pihak lainnya. Perlu ada permainan strategi untuk sukses mendapatkan kekuasaan. Lebih lanjut ia menyatakan, kekuasaan tersebar dimana-mana, berada pada level mulai masyarakat sederhana hingga modern. Hampir tidak ditemukan ruang sosial yang bebas dari bekerjanya kekuasaan.

Berikut skema kekuasaan menurut Michel Foucault



Perbandingan 4 ahli mengenai konsep kekuasaan

MAX WEBER	BERTRAND RUSSEL	CHARLES F. ANDRAIN	MICHEL FOUCAULT
<p>Dilihat dari segi perbedaan kekuasaan dan kewenangan. Di antaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewenangan tradisional. 2. Kewenangan kharismatik. 3. Kewenangan legal-rasional. 	<p>Dilihat dari dorongan memperoleh kekuasaan. Di antaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kekuasaan tradisional. 2. Kekuasaan revolusioner. 3. Kekuasaan tanpa persetujuan. 	<p>Dilihat dari memperoleh kekuasaan melalui sumber daya kekuasaan. Di antaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber daya fisik. 2. Sumber daya ekonomi. 3. Sumber daya normatif. 4. Sumber daya personal. 5. Sumber daya ahli. 	<p>Dilihat dari persamaan pengetahuan sebagai sebuah kekuasaan. Dimana kekuasaan dapat diperoleh melalui strategi-strategi permainan kekuasaan. Sehingga setiap ruang sosial akan dipengaruhi oleh sebuah kekuasaan.</p>

Sumber : Penulis

PERBEDAAN KEKUASAAN PADA MASYARAKAT SEDERHANA DAN MAJU

Masyarakat sederhana atau disebut juga *masyarakat bersahaja*, memiliki ciri-ciri:

- Setiap anggotanya berpartisipasi dalam setiap kegiatan.
- Terjadi hubungan langsung dan akrab.
- Ada sikap saling mengawasi secara ketat.
- Memiliki ikatan kuat untuk mempertahankan diri terhadap serangan dari luar.
- Mempunyai kesadaran kuat terhadap nilai dan kaidah yang sama seperti tolong-menolong dan gotong-royong.
- Sengketa diselesaikan secara cepat dan informal mencegah terjadinya keretakan.
- Kekuasaan tersebar dengan merata, persamaan sosial tercapai secara maksimal.

- Pemimpin hanya muncul dalam keadaan darurat apabila diperlukan, dan biasanya orang tersebut menguasai satu atau lebih sumber daya di bidang ekonomi, agama dan militer.

Masyarakat bersahaja pada umumnya bermata pencaharian sebagai pengumpul makanan, berburu dan nelayan. Mata pencarian yang "habis sekali makan" ini mengakibatkan surplus ekonomi menjadi terbatas. Sampai saat ini di zaman globalisasi masih terdapat masyarakat yang memiliki ciri-ciri di atas, seperti orang Eskimo, masyarakat pedalaman Papua Keraki dan suku Bushman di Utara. Ketiga suku tradisional ini memiliki ciri bahwa *kekuasaan individu tidak dominan*. Masing-masing anggota masyarakat mengambil inisiatif sendiri dalam kegiatannya. Meskipun ada pemimpin biasanya hanya bersifat sementara, kewenangan terbatas, tidak punya hak istimewa, dipilih berdasarkan faktor keturunan.

Masyarakat maju atau dikenal sebagai masyarakat kompleks tumbuh karena bertambahnya jumlah penduduk dan peralihan ekonomi dari pastoral ke agraris. Ada beberapa ciri masyarakat ini :

- Ada kegiatan untuk mengadakan surplus ekonomi.
- Sulit terjadi komunikasi langsung dan mengadakan kesepakatan.
- Tidak mungkin dilakukan pemerataan.
- Muncul keinginan individual.
- Pribadi atau keluarga berkesempatan untuk melancarkan pengaruh secara mandiri.

Munculnya kepemimpinan individu dapat kita lihat dari uraian berikut; pada *bidang militer*, seseorang dapat menjadi pemimpin apabila mampu menerapkan strategi dengan tepat dan memenangkan peperangan melawan musuh. Oleh masyarakat ia dan keluarganya diberi hadiah dan hak istimewa sehingga muncul keinginan baru dari orang tersebut untuk

mempertahankan dan memperluas kekuasaannya. Pada *bidang ekonomi* seorang petani dapat menjadi pemimpin apabila ia mampu mengumpulkan kekayaan dari hasil panennya. Tanah yang luas menjadikan ia cenderung akan merekrut banyak tenaga kerja untuk terus meningkatkan hasil taninya, bagi orang yang tidak memiliki tanah bersedia bekerja sebagai budak atau pembantu agar dapat menghidupi keluarganya. Pada *bidang ideologi atau kepercayaan*, seseorang dapat menjadi pemimpin apabila ia diyakini oleh masyarakat memiliki kekuatan *magic* untuk menyembuhkan penyakit, mendatangkan rezeki dan memperoleh segala sesuatu yang diinginkan. Dengan kepercayaan dari masyarakat itulah ia membangun pusat kekuasaan bagi diri dan keluarganya.

Ketiga jenis pemimpin di atas akan berusaha mempertahankan dan memperluas kekuasaannya dengan terus-menerus melakukan pengendalian sosial sehingga kondisi masyarakat menjadi stabil.

PERTUMBUHAN KEKUASAAN

Ada 3 perkembangan dalam kekuasaan :

- Bagi individu atau kelompok masyarakat yang memiliki salah satu sumber kekuasaan, otomatis akan memiliki sumber kekuasaan yang lain. Misalnya, orang yang memiliki kekuatan militer akan menggunakan kekerasan untuk mendapat tanah yang merupakan sumber kekuasaan ekonomi. Begitu juga dengan orang yang dipercaya memiliki kekuatan gaib, baik dengan cara halus maupun dengan kekerasan ia mampu untuk menguasai sumber kekuasaan ekonomi.
- Kehadiran seseorang atau sekelompok masyarakat yang memiliki sumber dan struktur kekuasaan, lambat laun akan memunculkan kekuatan oposisi untuk menentang stabilitas masyarakat yang diciptakan pemimpin tadi. Kekuasaan kelompok oposisi tadi dapat semakin kuat

apabila ia mampu menyuarakan kepentingan publik seharusnya berada di atas kepentingan pribadi. Isu perbandingan mana yang lebih utama aspek publik atau privat dapat mengantarkannya untuk memiliki sumber kekuasaan kepercayaan atau ideologi sehingga mampu untuk menyaingi kekuasaan individu yang sudah mapan tadi.

- Semakin bertambah jumlah masyarakat maka semakin berkembang fungsi minoritas sebagai perwakilan mayoritas dalam mengambil keputusan.

STRUKTUR KEKUASAAN DAN AKSI

Struktur kekuasaan yang paling menarik adalah yang paling banyak massanya, memiliki sumber daya, dan kesepakatan terhadap nilai-nilai tujuan bersama sebagai hasil pengambilan keputusan bersama. Dengan struktur seperti di atas akan menjadikan anggotanya lebih taat kepada pemimpin, sehingga ia dapat mengembangkan sumber daya, disiplin organisasi, lebih mandiri/otonom bahkan memiliki kesempatan mengeksploitasi masyarakat. Suatu kekuasaan dapat dianalisa berdasarkan keketatan struktur kekuasaan, struktur kekuasaan yang luwes dan ketat. Berikut matriks perbandingan dua struktur kekuasaan :

Karakteristik pembanding	Struktur kekuasaan luwes	Struktur kekuasaan ketat
Ciri-ciri	<ul style="list-style-type: none"> • Pemisahan berbagai struktur kekuasaan. • Kesempatan membentuk asosiasi volunteer. • Terdapat mobilitas dalam struktur kelas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyatuan tunggal struktur kekuasaan. • Larangan membentuk asosiasi mandiri (harus di bawah koordinasi pemerintah). • Mobilitas sosial sangat terbatas

<p>Negara</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Negara mempunyai otonomi terbatas. • Lembaga non pemerintah mempunyai kekuasaan politik tersendiri dan dapat menuntut legitimasi dari masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Negara mempunyai otonomi yang luas, memiliki kekuasaan mutlak dalam hal tanah, izin menikah, sekaligus menjadi panglima perang (ex. Negara kerajaan) • Negara menjalankan birokrasi • Kekuasaan dijalankan atas dasar tradisi, kepercayaan, mitos, mengembangkan nilai-nilai sekunder yang dilakukan oleh pendeta.
<p>Kekuasaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak meratanya distribusi kekuasaan, karena sebaran kekuasaan. • Permusyawaratan umum antara masyarakat dengan pemerintah dapat merubah haluan Negara. • Termasuk memilih perwira angkatan perang, melalui badan permusyawaratan. • Pusat kekuasaan tersebar pada raja beserta keluarga, bangsawan, gereja, dan pengusaha yang berada di pusat perkotaan seperti di Yunani kuno, AS, Athena dan Eropa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Konsentrasi kekuasaan pada ekonomi, militer, politik, pendidikan dan propaganda. • Kekuasaan politik menguasai kekuasaan ekonomi, seperti sarana produksi, barang-barang konsumtif, upah maupun harga. • Kekuasaan politik menguasai kekuasaan militer, pengendalian kekerasan, Angkatan Bersenjata, polisi dan teroris

		<ul style="list-style-type: none"> • Kekuasaan politik menguasai kekuasaan ideologi, mengeuasai sarana psikologis untuk menjalankan kekerasan. • Asosiasi-asosiasi mandiri dilarang oleh Negara • Organisasi sosial dikendalikan agar dapat dipergunakan oleh Negara. • Kekuasaan ekonomi yang terkonsentrasi menunjukkan pendidikan yang rendah dan membatasi partisipasi politik. • Tidak mungkin terjadi mobilitas sosial dari yang rendah ke yang tinggi. • Masyarakat diperbolehkan menjadi angkatan bersenjata/birokrat dengan gaji yang rendah.
Kesimpulan	<ul style="list-style-type: none"> • Kesepakatan • Nilai-nilai tradisional • Memungkinkan terjadinya perubahan sosial 	<ul style="list-style-type: none"> • Monopolistik • Mutlak • Manipulatif

UNSUR-UNSUR TERBENTUKNYA KEKUASAAN TERTINGGI DALAM NEGARA

- Adanya kepentingan dan dorongan untuk menciptakan ketertiban sosial.
- Perebutan kekuasaan oleh kelompok oposisi atau bergabung membentuk koalisi.
- Keinginan untuk mempertahankan integritas kelompok
- Tercukupinya pangan dan jaminan kedamaian.
- Legitimasi dapat terjadi atas dua hal; (1) Kepatuhan warga masyarakat (2) Merupakan Negara yang merdeka.

LEGITIMASI DAN KOERSI

Kekuasaan pada masyarakat ada yang sah dan ada tidak sah. Dikatakan *sah* apabila nilai yang berlaku dalam menjalankan kekuasaan diterima dan diakui oleh masyarakat. Misalnya, keputusan yang dibuat pengadilan, ayah yang menghukum anaknya. Sedangkan yang *tidak sah* misalnya kasus pemberian uang suap.

Kualitas kekuasaan ditentukan kualitas *koersi*, yakni kekuatan dalam bentuk kekerasan yang diterapkan, baik dapat menghancurkan ataupun sekedar ancaman. Koersi ini bertolak belakang dengan pemilu, diplomasi, propaganda, sangsi, boikot, dan lain-lain. Karena cara-cara ini tidak menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan politik. Bila koersi selalu digunakan maka nilai “kerjasama” akan hilang, dan berefek negatif yang hanya akan menimbulkan lingkaran kekerasan (Schermerhon, R.A. 1987).

DAFTAR PUSTAKA

- Bootomore, Tom. 1992. *Sosiologi Politik*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Jalaluddin Rakhmat. 1999. *Rekayasa Sosial, Reformasi atau Revolusi?* Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Raga Maran, Rafael. 2001. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Duverger, Maurice. 2001. *Sosiologi Politik*. Jakarta : PT. Radja Grafindo Persada.
- Ramlan Surbakti. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : PT. Gramedia.
- Damsar. 2010. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta : PT Prenadamedia Group.
- Martin, Rodeeeric. 1990. *Sosiologi Kekuasaan*. Jakarta : PT. Rajawali.
- Schermerhon, R.A. 1987. *Masyarakat dan Kekuasaan*. Jakarta : PT. Rajawali .

- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Sosiologi Kelompok*. Bandung: CV. Remadja Karya.
- Miriam Budiarto. 1972. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia : Jakarta
- Rush, Michael & Althoff, Philip. 2001. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta : PT. Radja Grafindo Persada.
- Sunyoto Usman. 2001. Bahan kuliah "Sosiologi Politik". PPS Ilmu Politik UGM.
- Gamal Pasya. 2009. *Negosiasi atau Mediasi, Memilih Pendekatan dalam Menangani Konflik*. Makalah Pelatihan Resolusi Konflik. LSM QBar Padang.
- Kamus Bahasa Indonesia-Inggris, Inggris-Indonesia 2000. Dewan Eja Pro. 2009.
- Mohd. Foad Sakdan. 2005. *Pengurusan Konflik*. Malaysia: Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur.
- Hendricks, W. 2006. *Bagaimana Mengelola Konflik, Petunjuk Praktis Untuk Manajemen Konflik yang Efektif*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Miall, H., Ramsbotham, O., & Woodhouse, T. 2000. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer, Menyelesaikan, Mencegah, Mengelola dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama dan Ras*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Spangle, Michael & Isenhardt, M. W. 2003. *Negotiation : Communication For Diverse Settings*. London: Thousand Oaks.
- Dewan Eja Pro. 2009. Malaysia: tnt dan Dewan Bahasa dan Pustaka